

TUGAS AKHIR

STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
(A.Md) pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Disusun Oleh :

SENNI JANDRIANA

NIM : 01076203649



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU

2013

ABSTRAK

STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh :

SENNI JANDRIANA

NIM : 01076203649

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi yang berlangsung pada tanggal 30 Januari sampai 30 April 2013 di Instansi Pemerintah yakni Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk mengetahui strategi peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi serta sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

Hasil penelitian ini berdasarkan wawancara dengan Narasumber di Instansi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu untuk mengetahui strategi-strategi peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut. Dan strategi-strategi tersebut adalah seperti melakukan pendataan wajib pajak 1 x 3 bulan, penetapan, pemungutan perbulan, dan penagihan secara door to door terhadap wajib pajak, meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pajak hotel dan restoran.

Kata kunci : Pajak Hotel dan Restoran, Pendapatan Asli Daerah dan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Engkau Ya Allah atas segala karunia yang senantiasa kami rasakan, salah satu karunia yang Engkau berikan adalah terselesaikannya Tugas Akhir ini. Keberhasilan menyelesaikan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari kasih sayang Mu Ya Rabbi Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Shalawat beriring salam selalu tercurah pada suritauladan umat manusia Rasulullah Muhammad SAW, Beliaulah yang telah membuktikan sebagai manusia yang mulia, mulia disisi Allah dan mulia disisi makhluk Allah, dan Rasulullah adalah contoh pribadi yang sangat mulia.

Syukur Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul : **“Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi”**. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar *Ahli Madya (A. Md)* pada Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Hermizal dan Ibunda Rosmida, S.Pd tercinta, yang tidak pernah bosan mendo'akan dan memberi motivasi, cinta, dan kasih sayang kepada penulis. Maka dari itu tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang ada disekeliling penulis, dan maka dari itu izinkanlah

penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Nasir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan beserta Pembantu Rektor (Purek) I, II, III yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi ini.
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, Sp, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan beserta Pembantu Dekan (Pudek) I, II, III yang telah memberikan Rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Mahmuzar, M. Hum selaku Ketua Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriyah, M. Si selaku Sekretaris Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M, Si selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu begitu banyak dan telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Yusriasis, SE, M, Si selaku Pembimbing Proposal yang telah meluangkan waktu begitu banyak dan telah memberikan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Bapak Akmal selaku Instruktur di tempat PKL, beserta Kasi dan Staf-Staf di ruangan Kabid Perimbangan Dan Pembukuan dan beserta Bapak Saptudis, SE selaku Kasubag Program yang telah banyak memberikan informasi pada saat saya melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Kedua orang tua dan keluarga saya yaitu Ayahanda Hermizal dan Ibunda Rosmida, S. Pd yang telah membimbing saya dari saya masih bayi hingga menjadi perempuan dewasa seperti saat ini, dan kepada nenek Aminah, Uni Visca, Onga Sepmi, beserta adik-adik saya yaitu Igo, Nia, Indah, dan Ardi yang telah memberikan senyuman manis dan kocak tawa pada saat saya pulang kampung.
10. My Prince, terimakasih atas bantuannya yang tidak pernah bosan memberikan dukungan, semangat, kesabaran, serta do'a dan selalu ada disaat ku sedih dan bahagia.
11. Terima kasih kepada semua teman-teman kost yaitu Kak Ratna, Kak Acha, Kak Uci, Mira, dan Ulfa yang sudah memotivasi serta memberikan keceriaan baik dalam duka maupun senang.
12. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2010 yaitu Lilis, Zakia, Desy, Nita, Tyni, Tia, Yeni, Tari, Fuji, Ade, Iyal, Ina, Didik, Fiza, Fara, Nurzi, Mungi, Engki, Kodri, Amin, Dila, Birin, Rini, Rika, Tomo, Jai, Agus, Ilham, Hadi, Riki, Syaiful, Fika, Yesy, dan Muslim, dan semoga kita bisa bertemu lagi dilain kesempatan, AMIN.

13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan laporan akhir ini, baik yang langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini.

14. Buat orang yang pernah menyakiti saya, terima kasih atas warna yang telah kalian berikan, dan terima kasih pula karena kalian telah memberikan arti penting dalam kehidupan.

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis menyadari walaupun sudah berusaha secermat mungkin, namun pasti ada terdapat kelemahan yang terdapat didalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan, saran dan masukan dari semua pihak yang berkaitan dengan penyempurnaan dari tugas akhir ini.

Penulis tidak dapat memberikan imbalan atas bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis melainkan penulis hanya bisa memohon do'a semoga Allah SWT membalas budi baik dan jasa yang diberikan, Insya Allah mendapat imbalan yang setimpal Amin Ya Robbal Alamin.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya dan penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Mei 2013

Penulis

SENNI JANDRIANA
NIM. 01076203649

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir	8
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	10
II.1 Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Kabupaten	
Kuantan Singingi.....	10
II.2 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Dinas Pendapatan	
Kabupaten Kuantan Singingi	12
II.3 Struktur Organisasi	15
II.4 Uraian Tugas	16
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	18

III.1 TINJAUAN TEORI	18
III.1.1 Pengertian Pajak.....	18
III.1.2 Fungsi Pajak.....	19
III.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	20
III.1.4 Jenis-Jenis Pajak	21
III.1.5 Pengertian Pajak Hotel dan Restoran	23
III.1.6 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran.....	26
III.1.7 Objek Pajak Hotel Dan Restoran	27
III.1.8 Subjek Pajak, Wajib Pajak Hotel dan Restoran	30
III.1.9 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel dan Restoran	30
III.1.10 Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak Hotel dan Restoran.....	32
III.1.11 Pajak Menurut Syari'ah.....	33
III.1.12 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34
III.2 TINJAUAN PRAKTEK	36
III.2.1 Penerimaan Sektor Pajak Kabupaten Kuantan Singingi	36
III.2.2 Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	42
III.2.3 Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten	

Kuantan Singingi.....	44
BAB IV PENUTUP.....	46
IV.1 Kesimpulan	46
IV.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber dana daerah adalah pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (2009:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Marihot P. Siahaan, SE : 2005 : 10).

Pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan di Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah. Penetapan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Pajak daerah adalah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini target dan realisasi terhadap pajak hotel dan restoran Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Terhadap Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2008-2011 (Dalam Rupiah)

Thn	Target Hotel	Realisasi	Target Restoran	Realisasi
2008	14.264.500.000	13.427.134.537	24.529.829.013	25.380.245.966
2009	19.105.290.000	17.081.493.257	24.149.610.872	23.147.073.224
2010	25.305.290.000	19.269.169.447	28.205.065.776	21.435.798.449
2011	29.226.042.000	15.450.148.339	24.905.741.844	18.155.141.241

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

Berikut ini persentase kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel 1.2
Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2011 (Dalam Rupiah)

Thn	Pendapatan Asli Daerah	Pajak			
		Hotel	Kontribusi	Restoran	Kontribusi
2008	24.530.122.983	165.914.765	0,67%	709.190.745	2.89%
2009	25.626.181.612	132.690.375	0,51%	803.965.624	3,13%
2010	27.870.544.224	265.000.000	1,06%	730.000.000	2,61%
2011	24.690.591.621	114.909.575	0,46%	719.743.574	2,91%

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan data tabel 1.2 diatas kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi dengan rata-rata 0,67% selama empat tahun terakhir (2008-2011). Pada tahun ketahun kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi berfluktuasi.

Penyebab berfluktuasinya pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi dikarenakan kurangnya masyarakat yang menginap di hotel tersebut, apalagi kebanyakan orang yang menginap disitu hanya orang-orang pendatang saja seperti Turis, Camat, dan guru-guru atau PNS yang melakukan pelatihan, dan penghasilan yang mereka dapatkan tidak seimbang dengan pengeluaran, maka dari itu pengusaha hotel tersebut lalai untuk membayar kewajiban perpajakannya.

Pada tahun 2008 sektor kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi berkontribusi dalam membangun jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 0,67%, pada tahun 2009 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan sebesar 0,16% menjadi 0,51%, pada tahun 2010 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan sebesar 0,55% menjadi 1,06%, dan pada tahun 2011 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan sebesar 0,60% menjadi 0,46%.

Berdasarkan data tabel 1.2 diatas kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi dengan rata-rata 2,88% selama empat tahun terakhir (2008-2011). Pada tahun ketahun kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi berfluktuasi.

Penyebab berfluktuasinya pajak restoran di Kabupaten Kuantan Singingi dikarenakan banyaknya masyarakat yang melakukan usaha dalam bidang restoran, meskipun pajak restoran tersebut selalu berfluktuasi, tetapi pajak restoran lebih tinggi dari pada pajak hotel, dan pajak restoran di Kabupaten Kuantan Singingi lebih banyak dari pada pajak hotel sehingga wajib pajak restoran selalu meningkat.

Pada tahun 2008 sektor kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi berkontribusi dalam membangun jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 2,89%, pada tahun 2009 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan sebesar 0,24% menjadi 3,13%, pada tahun 2010 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan sebesar 0,52% menjadi 2,61%, dan pada tahun 2011 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan 0,30% menjadi 2,91%.

Berikut ini tabel yang menyatakan jumlah hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel 1.3
Jumlah Hotel dan Restoran
di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Data	Jumlah
1	Hotel	15
2	Restoran	35

***Sumber :** Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi*

Saat ini besarnya penerimaan daerah tingkat provinsi yang berasal dari pajak daerah cukup memadai. Sementara itu, penerimaan daerah tingkat kabupaten/kota yang berasal dari pajak daerah masih relatif kecil. Maka keadaan ini kurang mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab dengan titik berat pada daerah tingkat kabupaten/kota. (Marihot P. Siahaan, SE : 2005 : 31).

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.”**

1.2 Perumusan Masalah

Adapun pemasalahan yang penulis angkat dari penelitian ini yaitu:
 Bagaimana Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.

1.3.2 Manfaat Penelitian.

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tempat Penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan di instansi pemerintah yaitu Dinas Pendapatan yang berada di Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.2 Waktu Penelitian.

Penulis melakukan penelitian pada tanggal 30 Januari s/d 30 April 2013 di instansi pemerintah yaitu Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.3 Jenis Data.

- a. Data Primer.

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yaitu orang yang memberikan informasi melalui wawancara. Yang mana dalam hal ini penulis telah mewawancarai Kasubag Program, Kasi Dokumentasi dan Keberatan,

Kasi Penagihan Pajak Daerah, Kasi Pendataan dan Pendaftaran, serta beberapa pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dianggap bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis.

b. Data sekunder.

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen, catatan/arsip dilokasi penelitian yaitu di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.4 Metode Pengumpulan Data.

a. Observasi.

Merupakan pengamatan secara langsung di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Interview/wawancara.

Interview/wawancara adalah tanya jawab kepada narasumber yang ada di instansi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Yang mana dalam hal ini penulis telah mewawancarai Kasubag Program, Kasi Dokumentasi dan Keberatan, Kasi Penagihan Pajak Daerah, Kasi Pendataan dan Pendaftaran, serta beberapa pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dianggap bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis

c. Dokumentasi.

Merupakan pemanfaatan data-data yang ada di instansi tersebut, yang mana data-data tersebut didapatkan dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada di instansi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.5 Analisis Data.

Analisis data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dan dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian menggunakan deskripsi (gambaran/penjelasan) secara detail dengan melakukan pengolahan data.

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Untuk lebih jelasnya mengenai penulisan laporan ini, maka penulis akan menyajikan sistematika penulisannya:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian

Pada bab ini dibahas mengenai Gambaran Umum mengenai keadaan perusahaan seperti Sejarah Berdirinya, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas.

BAB III : Tinjauan teori dan praktek

Pada bab ini dibahas mengenai Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Jenis-Jenis Pajak, Pengertian Pajak Hotel dan Restoran, Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran, Objek dan Subjek Pajak Hotel dan Restoran, Tarif Pajak Hotel dan Restoran, Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Menurut Syari'ah, Pendapatan Asli Daerah (PAD, Penerimaan Sektor

Pajak, Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran, dan Strategi Peningkatan
Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kantor Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

II.1 Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten baru di Provinsi Riau dari hasil pemekaran Kabupaten induk yaitu Indragiri Hulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.

Dengan demikian dalam rangka kelancaran pelaksanaan otonomi daerah dengan kewenangan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan atas desentralisasi, dipandang perlu menata organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan membentuk organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan yang dituangkan dalam Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 48 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan.

Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. H. Yonatan Marbun, SE, MM
2. Drs. H. Rasiman Rauf, M. Si
3. H. Maharlius, SE, MM
4. Drs. Darwin Yohanes
5. Drs. H. Sumarly, MM
6. H. Nafrial, SP, MM

Berkaitan dengan hal ini Dinas Pendapatan Daerah mempunyai dasar hukum pembentukan dan kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu :

1. Dasar hukum pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2008) dijabarkan lagi dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2009 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sesuai pasal 96 ayat a sampai dengan ayat p Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2008). Maka kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 16 kewenangan, yakni :

- a. Perencanaan dan pengendalian.
- b. Pelatihan bidang pendapatan.
- c. Alokasi Sumber Daya Manusia potensial bidang pendapatan.
- d. Penelitian yang mencakup wilayah kabupaten bidang pendapatan.
- e. Penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- f. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
- g. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.

- h. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Penyusunan kebijaksanaan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan daerah.
- j. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan yang wajib dilaksanakan.
- k. Penyusunan rencana bidang pendapatan.
- l. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa.
- m. Penyelenggaraan system bidang pendapatan daerah.
- n. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan.
- o. Pengawasan teknik terhadap pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan bidang pendapatan daerah.
- p. Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

II.2.1 Visi.

“ Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Aparat yang Ramah, Professional dan Inovatif ”.

- a. **Optimalisasi** : upaya yang terbaik atau menguntungkan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- b. **Ramah** : sikap dan perilaku yang baik dalam menyenangkan yang ditunjukkan oleh aparatur dinas pendapatan, baik budi bahasa, tutur kata,

maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.

- c. **Profesional** : aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (skill) dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. **Inovatif** : aparatur yang mampu melakukan pembaharuan (kreasi baru) dalam peningkatan penerimaan daerah.

II.2.2 Misi.

- a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
- b. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi.
- c. Meningkatkan pelaksanaan system dan prosedur pendapatan daerah.
- d. Meningkatkan produktifitas kerja pegawai.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk operasional yang terarah berupa tujuan dan sasaran, yaitu:

II.2.3 Tujuan.

- a. Meningkatnya kegiatan intensifikasi pendapatan daerah.
- b. Meningkatnya kegiatan ekstensifikasi pendapatan daerah.
- c. Meningkatnya pelayanan prima kepada wajib pajak.
- d. Meningkatnya sosialisasi produk-produk hukum pajak dan retribusi daerah.

II.2.4 Sasaran.

- a. Terlaksananya tingkat pencapaian target pendapatan daerah minimal 5% dari tahun sebelumnya.
- b. Terlaksananya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru ditetapkan dengan peraturan daerah.
- c. Terlaksananya pelayanan dan penyampaian SKPD, SKRD, dan administrasi tepat waktu.
- d. Terlaksananya penyelesaian administrasi pajak dan retribusi daerah yang cepat dan tertib.
- e. Terlaksananya penagihan pajak dan retribusi daerah dengan baik dan akuntabel.
- f. Terlaksananya pencapaian realisasi pendapatan daerah.
- g. Terpehuninya kebutuhan fasilitas kerja yang memadai.
- h. Terlaksananya hubungan kerja yang nyaman dan harmonis.
- i. Terlaksananya kegiatan sosialisasi produk hukum tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- j. Terwujudnya kesadaran wajib pajak/retribusi daerah dalam memenuhi kewajibannya.
- k. Terlaksananya sistem dan prosedur administrasi pendapatan daerah oleh unit kerja pengelolaan pajak/retribusi daerah.
- l. Terlaksananya pendidikan pelatihan teknis bagi pegawai.

II.3 Struktur Organisasi

II.4 Uraian Tugas

II.4.1 Kepala Dinas.

- a. Kepala Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan.

II.4.2 Sekretariat.

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- b. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, serta keuangan.

II.4.3 Bidang Pendataan dan Penetapan.

- a. Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi pelaporan

Bidang Pendataan dan Pendaftaran, perhitungan dan penetapan , dokumentasi dan keberatan.

II.4.4 Bidang Penagihan.

- a. Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang Penagihan Retribusi Daerah, Penagihan Pajak Daerah, Penagihan Penerimaan Lain-Lain.

II.4.5 Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan.

- a. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Evaluasi, Pelaporan dan Penerimaan Lain-Lain.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

III.1 TINJAUAN TEORI

III.1.1 Pengertian Pajak.

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh warga Negara pada Negara berdasarkan hukum untuk kesejahteraan rakyat. Berikut ini akan dijelaskan beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu:

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (2009 : 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Anastasia Diana (2009 : 1), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann (2008 : 2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut S. I. Djajadiningrat (2011 : 1), pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Sumadwijaya Suparman (2005 : 3), pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

III.1.2 Fungsi Pajak.

a. Fungsi Budgetair.

Maksudnya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi pajak yang paling utama adalah untuk mengisi kas Negara. (Dra. Haula Rosdiana, M. Si : 2005 : 40).

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*).

Maksudnya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

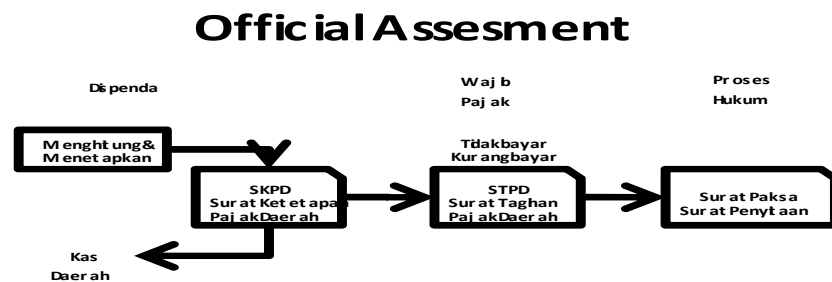
Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

III.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.

a. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.



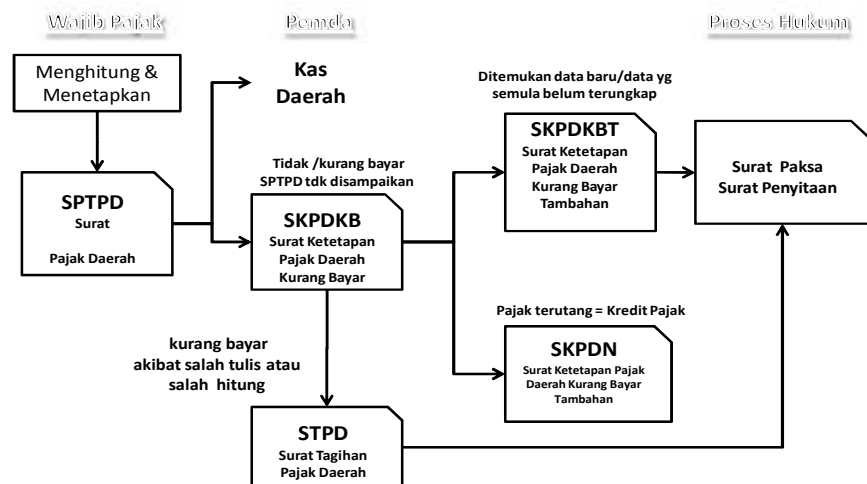
Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

b. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepadawajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Self Assessment



Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

III.1.4 Jenis-Jenis Pajak.

a. Menurut golongannya:

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya:

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya:

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

a. Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

e. Bea Materai.

f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan sebagainya.

2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi menjadi 2, yaitu:

- a. Pajak provinsi terdiri dari:
 - 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air.
 - 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air.
 - 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - 1. Pajak Hotel.
 - 2. Pajak Restoran.
 - 3. Pajak Hiburan.
 - 4. Pajak Reklame.
 - 5. Pajak Penerangan Jalan.
 - 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
 - 7. Pajak Parkir.

III.1.5 Pengertian Pajak Hotel dan Restoran.

- a. Pengertian Pajak Hotel.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, yaitu:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha Hotel adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama Pihak Lain yang menjadi tanggungannya.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik hotel atas imbalan atas jasa yang disediakan. Pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, Surat Pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya.

5. Bon penjualan (Bill) atau faktur atau invoice atau bukti penerimaan adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa penginapan beserta fasilitas pendukung penginapan, penjualan makanan dan minuman.

b. Pengertian Pajak Restoran.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui, yaitu:

1. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, kolam pancing, pedagang kaki lima, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan.
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
4. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

III.1.6 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran.

a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pajak Hotel yang merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah, maka Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Hotel perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.
4. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Hotel.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pajak Restoran yang merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah, maka Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Restoran perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.
4. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Restoran.

III.1.7 Objek Pajak Hotel Dan Restoran.

a. Objek Pajak Hotel.

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan di hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pelayanan yang disediakan oleh hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain: wisma parawisata, losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos (rumah sewa) dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

2. Fasilitas penunjang penginapan antara lain restoran, telepon, faksimil, internet, VCD/DVD player, fotocopy, pelayanan cuci dan setrika (*laundry*), taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola oleh pihak Hotel.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, salon kecantikan, spa atau message yang disediakan atau dikelola hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.

Pada pajak hotel, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. Jasa sewa apartemen.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

b. Objek Pajak Restoran.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

1. Restoran.
2. Rumah makan.
3. Kafetaria.
4. Kantin.
5. Warung.
6. Kedai kopi.
7. Bar.
8. Toko Kue/bakery.
9. Jasa boga/catering.

Yang tidak termasuk kedalam objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

III.1.8 Subjek Pajak, Wajib Pajak Hotel dan Restoran.

- a. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel.
 1. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
 2. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran.
 1. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
 2. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

III.1.9 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel dan Restoran.

- a. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel.
 1. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
 2. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 3. Cara perhitungan pajak hotel besar pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{tarif pajak} \times \text{jumlah pembayaran yang} \\ &\quad \text{dilakukan kepada hotel}\end{aligned}$$

Contoh : Ada seseorang yang menginap di Hotel “ABC” dan melakukan pembayaran atas:

Jasa sewa kamar	Rp 3.000.000,00
Jasa telepon	<u>Rp 400.000,00</u> +
Jumlah	Rp 3.400.000,00
Service charge 10%	<u>Rp 340.000,00</u> +
Jumlah pembayaran	Rp 3.740.000,00

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= 10\% \times 3.740.000,00 \\ &= 374.000,00\end{aligned}$$

b. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran.

1. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada Restoran.
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
3. Cara perhitungan pajak restoran besar pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{tarif pajak} \times \text{jumlah pembayaran yang} \\ &\quad \text{dilakukan kepada hotel}\end{aligned}$$

Contoh : Ada seseorang menikmati hidangan yang disediakan oleh restoran “DEF” dan melakukan pembayaran atas :

Makanan	Rp 150.000,00
Minuman	<u>Rp 50.000,00</u> +
Jumlah	Rp 200.000,00
Service charge 10%	<u>Rp 20.000,00</u> +
Jumlah pembayaran	Rp 220.000,00

$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= 10\% \times 220.000,00 \\ &= 22.000,00\end{aligned}$

III.1.10 Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak Hotel dan Restoran.

- a. Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak Hotel.
 1. Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
 2. Masa Pajak Hotel adalah 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak Restoran.
 1. Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
 2. Masa pajak adalah jangka waktu, yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

III.1.11 Pajak Menurut Syari'ah.

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *(Al-Ushr)* atau *(Al-Maks)*, atau bisa juga disebut *لِضْرِيَّة* (*Adh-Dharibah*), yang artinya : “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”.

Atau suatu ketika bisa disebut *(Al-Kharaj)*, tetapi *Al-Kharaj* biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut *(Shahibul Maks)* atau *(Al-Asysyar)*.

Dibawah ini beberapa pendapat ulama yang berkaitan tentang pajak, yaitu:

- a. Pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Dan ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda :

لَيْسَ فِيْهَا

Artinya : “Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. “ (HR Ibnu Majah).

- b. Kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana. Diantara ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghazali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm.

Dan ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda :

Artinya : “*Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.*”(HR Tirmidzi).

III.1.12 Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

- a. Hasil pajak daerah.
- b. Hasil retribusi daerah.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, seperti bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Tabel III.1
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2008-2011
di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

Penerimaan	Tahun			
	2008	2009	2010	2011
Pajak daerah	4.109.146.098	7.161.435.169	4.732.500.000	5.352.059.067
Retribusi daerah	5.724.720.247	7.866.058.124	8.431.920.000	7.301.274.895
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.760.960.430	3.233.618.989	1.500.000.000	2.633.538.602
Lain-lan PAD yang sah	9.935.296.208	7.365.069.330	13.206.124.224	9.403.719.057

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan di hotel dan/atau di restoran. Perkembangan Pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan Restoran sudah cukup berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.

Sementara itu perkembangan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun anggaran 2008-2011 sudah cukup baik, meskipun pada tahun ketahun selalu mengalami perubahan. Maka dari itu diperlukan upaya/cara untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran adalah melalui lembaga Persatuan Pengusaha Hotel yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut yang bertugas menyampaikan kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran tentang adanya kenaikan pajak sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan melaksanakan sistem pemantauan di lapangan oleh petugas Dinas Pendapatan kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran serta melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran dalam hal pembukuan dan pencatatan yang berhubungan dengan hotel dan restoran.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka disarankan untuk menerapkan sanksi yang tegas bagi Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang belum melunasi pajaknya, serta bagi Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang selalu menghindar dari pengenaan pajak, dan mengadakan kegiatan pembinaan kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran tentang arti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah, dan melaksanakan pemisahan tugas antara pihak penagihan pajak dengan pihak yang bertugas menerima setoran pajak untuk menghindari terjadinya penggelapan pajak.

III.2 TINJAUAN PRAKTEK

III.2.1 Penerimaan Sektor Pajak Kabupaten Kuantan Singingi.

Pajak merupakan salah satu pendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut ini persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel III.2
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2011 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2008	4.109.146.098	24.530.122.983	16,75%
2009	7.161.435.169	25.626.181.612	27,94%
2010	4.732.500.000	27.870.544.224	16,98%
2011	5.352.059.067	24.690.591.621	21,67%

***Sumber :** Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi*

Berdasarkan data tabel III.2 diatas pajak daerah memberikan kontribusi yang pertama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi dengan rata-rata 20,83% selama empat tahun terakhir (2008-2011). Pada tahun ketahun pajak daerah selalu berfluktuasi.

Penyebab berfluktuasinya pajak daerah pada tahun ketahun dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban perpajakannya, maka upaya yang dilakukan disini adalah dengan cara meningkatkan pendapatan daerah dan diadakannya penyederhanaan pajak untuk mempermudah masyarakat memahami dan mematuhi peraturan yang ada, sehingga pada akhirnya tumbuh kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada tahun 2008 sektor pajak berkontribusi dalam membangun jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 16,75%, pada tahun 2009 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan sebesar 11,19% menjadi 27,94%, pada tahun 2010 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan sebesar 10,96% menjadi 16,98%, dan pada tahun 2011 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan sebesar 4,69% menjadi 21,67%.

Berikut ini persentase kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel III.3
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2011 (Dalam Rupiah)

Tahun	Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2008	5.724.720.247	24.530.122.983	23,33%
2009	7.866.058.124	25.626.181.612	30,69%
2010	8.431.920.000	27.870.544.224	30,25%
2011	7.301.274.895	24.690.591.621	29,57%

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan data tabel III.3 diatas retribusi daerah memberikan kontribusi yang kedua terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi dengan rata-rata 28,46% selama empat tahun terakhir (2008-2011). Pada tahun ketahun retribusi daerah selalu berfluktuasi.

Penyebab berfluktuasinya retribusi daerah pada tahun ketahun dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban perpajakannya, hasilnya kurang memadai jika dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa lainnya, besarnya tarif retribusi, kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan, dan hal ini dikarenakan masyarakat atau yang menjadi wajib pajak tersebut tidak mengetahui arti pentingnya retribusi bagi daerahnya sendiri.

Pada tahun 2008 sektor retribusi berkontribusi dalam membangun jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 23,33%, pada tahun 2009 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan sebesar 7,36% menjadi 30,69%, pada tahun

2010 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan sebesar 0,44% menjadi 30,25%, dan pada tahun 2011 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan sebesar 0,68% menjadi 29,57%.

Berikut ini persentase kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel III.4
Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2011 (Dalam Rupiah)

Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2008	4.760.960.430	24.530.122.983	19,40%
2009	3.233.618.989	25.626.181.612	12,61%
2010	1.500.000.000	27.870.544.224	5,38%
2011	2.633.538.602	24.690.591.621	10,66%

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan data tabel III.4 diatas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi yang ketiga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi dengan rata-rata 12,01% selama empat tahun terakhir (2008-2011). Pada tahun ketahun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selalu mengalami berfluktuasi.

Penyebab berfluktuasinya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar

kewajiban perpajakannya, dan hal ini juga terjadi karena wajib pajak tidak mengerti proses atau prosedur pembayarannya.

Pada tahun 2008 sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkontribusi dalam membangun jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 19,40%, pada tahun 2009 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan sebesar 6,79% menjadi 12,61%, pada tahun 2010 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan sebesar 7,23% menjadi 5,38%, dan pada tahun 2011 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan sebesar 5,28% menjadi 10,66%.

Berikut ini persentase kontribusi penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel III.5
Kontribusi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2011 (Dalam Rupiah)

Tahun	Lain-Lain PAD yang Sah	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2008	9.935.296.208	24.530.122.983	40,50%
2009	7.365.069.330	25.626.181.612	28,74%
2010	13.206.124.224	27.870.544.224	47,38%
2011	9.403.719.057	24.690.591.621	38,08%

***Sumber :** Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi*

Berdasarkan data tabel III.5 diatas Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah memberikan kontribusi yang keempat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi dengan rata-rata 38,67% selama empat tahun terakhir (2008-2011). Pada tahun ketahun penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah selalu berfluktuasi.

Penyebab berfluktuasinya Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah dikarenakan proses pembayaran administrasi yang rumit, dan sosialisasi pembayaran yang tidak berjalan dengan efektif.

Pada tahun 2008 sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkontribusi dalam membangun jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 40,50%, pada tahun 2009 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan sebesar 11,76% menjadi 28,74%, pada tahun 2010 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan sebesar 18,64% menjadi 47,38%, dan pada tahun 2011 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan sebesar 9,30% menjadi 38,08%.

III.2.2 Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut ini persentase kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel III.6
Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2011 (Dalam Rupiah)

Thn	Pendapatan Asli Daerah	Pajak			
		Hotel	Kontribusi	Restoran	Kontribusi
2008	24.530.122.983	165.914.765	0,67%	709.190.745	2.89%
2009	25.626.181.612	132.690.375	0,51%	803.965.624	3,13%
2010	27.870.544.224	265.000.000	1,06%	730.000.000	2,61%
2011	24.690.591.621	114.909.575	0,46%	719.743.574	2,91%

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan data tabel III.6 diatas kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi dengan rata-rata 0,67% selama empat tahun terakhir (2008-2011). Pada tahun ketahun kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi berfluktuasi.

Penyebab berfluktuasinya pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi dikarenakan kurangnya masyarakat yang menginap di hotel tersebut, apalagi kebanyakan orang yang menginap disitu hanya orang-orang pendatang saja seperti Turis, Camat, dan guru-guru atau PNS yang melakukan pelatihan, dan

penghasilan yang mereka dapatkan tidak seimbang dengan pengeluaran, maka dari itu pengusaha hotel tersebut lalai untuk membayar kewajiban perpajakannya.

Pada tahun 2008 sektor kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi berkontribusi dalam membangun jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 0,67%, pada tahun 2009 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan sebesar 0,16% menjadi 0,51%, pada tahun 2010 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan sebesar 0,55% menjadi 1,06%, dan pada tahun 2011 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan sebesar 0,60% menjadi 0,46%.

Berdasarkan data tabel III.6 diatas kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi dengan rata-rata 2,88% selama empat tahun terakhir (2008-2011). Pada tahun ketahun kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi berfluktuasi.

Penyebab berfluktuasinya pajak restoran di Kabupaten Kuantan Singingi dikarenakan banyaknya masyarakat yang melakukan usaha dalam bidang restoran, meskipun pajak restoran tersebut selalu berfluktuasi, tetapi pajak restoran lebih tinggi dari pada pajak hotel, dan pajak restoran di Kabupaten Kuantan Singingi lebih banyak dari pada pajak hotel sehingga wajib pajak restoran selalu meningkat.

Pada tahun 2008 sektor kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi berkontribusi dalam membangun jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 2,89%, pada tahun 2009 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan sebesar 0,24% menjadi 3,13%, pada tahun 2010 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan sebesar 0,52% menjadi 2,61%, dan pada tahun 2011 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan 0,30% menjadi 2,91%.

III.2.3 Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.

- a. Melakukan pendataan wajib pajak 1 x 3 bulan, penetapan, pemungutan perbulan, dan penagihan secara *door to door* terhadap wajib pajak.
- b. Meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pajak hotel dan restoran.
- c. Melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak hotel dan restoran dalam hal pembukuan dan pencatatan yang berhubungan dengan hotel dan restoran.
- d. Meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dengan menggunakan kekuatan internal (dalam) untuk memanfaatkan peluang eksternal (luar) yang ada.
- e. Lembaga Persatuan Pengusaha Hotel dan Restoran yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut yang bertugas menyampaikan

kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran tentang adanya kenaikan pajak sesuai dengan peraturan daerah yang ada.

- f. Meningkatkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dalam peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.
- g. Peningkatan pengawasan atau system pemantauan di lapangan (insidentil) terhadap pelaksanaan pungutan pajak hotel dan restoran di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. (Afrizal : 2009 : 36).
- h. Meningkatkan keseimbangan antara pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi yang selalu mengalami perubahan.
- i. Meningkatkan promosi pariwisata serta keberadaan Hotel dan Restoran dengan kualitas promosi yang lebih efektif.

BAB IV PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan, bahwa :

1. Kontribusi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam empat tahun terakhir selalu berfluktuasi dengan seiring meningkatnya wajib pajak hotel dan restoran, meskipun pajak hotel dan restoran mempunyai kontribusi nyata tentang berfluktuasinya pajak hotel dan restoran terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, maka pajak hotel dan restoran perlu ditingkatkan lagi dengan mengoptimalkan potensi wajib pajak hotel dan restoran.
2. Strategi peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sampai saat ini sudah cukup memadai, tetapi jika masih ada pegawai yang lalai dalam melakukan pekerjaannya, maka hal itu harus dipertegas oleh atasan untuk menegur bawahan yang lalai tersebut. Yang mana strategi-strategi tersebut adalah seperti :
 - a. Melakukan pendataan wajib pajak 1 x 3 bulan, penetapan, pemungutan perbulan, dan penagihan secara *door to door* terhadap wajib pajak.
 - b. Meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukam intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pajak hotel dan restoran.

- c. Meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dengan menggunakan kekuatan internal (dalam) untuk memanfaatkan peluang eksternal (luar) yang ada.
- d. Lembaga Persatuan Pengusaha Hotel dan Restoran yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut yang bertugas menyampaikan kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran tentang adanya kenaikan pajak sesuai dengan peraturan daerah yang ada.
 - a. Peningkatan pengawasan atau system pemantauan di lapangan (insidentil) terhadap pelaksanaan pungutan pajak hotel dan restoran di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. (Afrizal : 2009 : 36).

IV.2 SARAN

Dari penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat dikekmukakan adalah :

1. Hendaknya dilakukan evaluasi kinerja guna mengetahui karyawan yang lebih ulet dan kompeten dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan; dan
2. Harus adanya keterbukaan antara karyawan dalam melaksanakan pekerjaan guna meningkatkan kinerja antara satu dengan yang lainnya.
3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan meningkatkan program sosialisasi baik langsung maupun dengan menggunakan media.
4. Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada wajib pajak, dan dengan dilakukan cara seperti ini maka hal ini dapat mendorong wajib pajak supaya membayar kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu.
5. Memberikan predikat kepada wajib pajak yang patuh membayar kewajiban perpajakannya, dan dengan demikian wajib pajak dapat termotivasi untuk membayar kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Afrizal, *Materi Perkuliahan Administrasi Keuangan Negara Dan Daerah*, UIN SUSKA RIAU, 2009.

Azhari, *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007.

Buku Saku Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan, 2012
Data Penerimaan tentang Pajak Hotel dan Restoran.

Diana, Anastasia, *Pepajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Andi Offset, Yogyakarta, 2009.

Ilyas, Wirawan B, *Hukum Pajak Edisi 4*, Salemba Empat, Jakarta, 2008.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Andi, Yogyakarta, 2009.

Resmi, Siti, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.

Rosdiana, Haula, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Siahaan, Marihot Pahala, *Pajak Daeah Dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

UNDANG-UNDANG :

Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 tentang
Pajak Hotel.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03 Tahun 2001 tentang
Pajak Hotel.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 21 Tahun 2012 Tentang *Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Hotel*.

Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03 Tahun 2011 Tentang
Pajak Restoran.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2001 tentang
Pajak Restoran.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2012 Tentang *Petunjuk
Pelaksana Pemungutan Pajak Restoran.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.*

NON BUKU

GOOGLE.COM, *Pajak Menurut Syari'ah*, Kamis, 18 April 2013, Pukul 3.00
WIB

GOOGLE.COM, *Cara Meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran*, 28 April 2013,
Pukul 10.00 WIB